

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah anak jalanan. Faktor yang menyebabkan munculnya anak jalanan dikarenakan faktor ekonomi (kemiskinan), masalah keluarga, broken home, perceraian orang tua atau keluarga sering cekcok, dalam diri anak itu sendiri dan lingkungan tempat tinggal (Darmanto, 2007).

Berdasarkan Data Kementerian Sosial RI pada tahun 2006, jumlah anak jalanan di seluruh Indonesia sebanyak 232.894 orang. Kemudian pada 2010 ada 159.230 anak jalanan, 2011 turun menjadi 67.607 anak jalanan, dan 2015

menjadi turun lagi menjadi 33.400 anak jalanan (<https://www.jawapos.com/jpg-today/20/11/2017/data-kemensos-masih-ada-16920-anak-jalanan>).

Tabel 1.1

Data PMKS Tahun 2011-2018 Provinsi DIY

Tahun	Gelandangan	Pengemis	Pemulung	Anak Telantar	Anak Jalanan
2012	250	235	623	15.376	479
2013	237	227	595	15.250	465
2014	265	217	583	14.860	427
2015	228	197	567	14.680	379
2016	204	183	543	14.570	354
2017	171	150	450	14.450	327
2018	236	170	511	13.960	348

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul Provinsi DIY 2012-2017

Berdasarkan data di atas di dapatkan bahwa pada tahun 2012 jumlah gelandangan sebanyak 250 orang, pengemis sebanyak 235 orang, pemulung sebanyak 623 orang, anak terlantar sebanyak 15.376 orang, anak jalanan sebesar 479, pada tahun 2013 jumlah gelandangan sebanyak 237 orang, pengemis sebanyak 227 orang, pemulung sebanyak 595 orang, anak terlantar sebanyak 15.250 orang, anak jalanan sebesar 465, pada tahun 2014 jumlah gelandangan sebanyak 265 orang, pengemis sebanyak 217 orang, pemulung sebanyak 583 orang, anak terlantar sebanyak 14.860 orang, anak jalanan sebesar 427, pada

tahun 2015 jumlah gelandangan sebanyak 228 orang, pengemis sebanyak 197 orang, pemulung sebanyak 567 orang, anak terlantar sebanyak 14.680 orang, anak jalanan sebesar 379, pada tahun 2016 jumlah gelandangan sebanyak 204 orang, pengemis sebanyak 183 orang, pemulung sebanyak 543 orang, anak terlantar sebanyak 14.570 orang, anak jalanan sebesar 354, pada tahun 2017 jumlah gelandangan sebanyak 171 orang, pengemis sebanyak 150 orang, pemulung sebanyak 450 orang, anak terlantar sebanyak 14.450 orang, anak jalanan sebesar 327, pada tahun 2018 jumlah gelandangan sebanyak 236 orang, pengemis sebanyak 170 orang, pemulung sebanyak 511 orang, anak terlantar sebanyak 13.960 orang, anak jalanan sebesar 348

Tabel 1.2

Data Anak Jalanan Tahun 2011-2018 Provinsi DIY

Tahun	Bantul	Kota Yogyakarta	Gunungkidul	Kulonprogo	Sleman
2012	126	118	83	73	79
2013	123	113	80	72	77
2014	115	106	71	65	70
2015	110	96	60	54	59
2016	106	90	55	49	54
2017	82	78	64	43	60
2018	114	80	72	49	60

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul Provinsi DIY 2012-2018

Berdasarkan data di atas di dapatkan bahwa pada tahun 2012 jumlah anak jalanan di Kabupaten Bantul lebih besar dibandingkan dengan kabupaten lain yang berada di Provinsi DI Yogyakarta, yaitu sebesar 126 orang, Kota Yogyakarta sebesar 118 orang, Kabupaten Gunungkidul sebesar 83 orang, Kabupaten Kulonprogo sebesar 73 orang dan Kabupaten Sleman sebesar 79 orang (Dinas Sosial Provinsi DIY, 2012). Pada tahun 2013 Kabupaten Bantul yaitu sebesar 123 orang, Kota Yogyakarta sebesar 113 orang, Kabupaten Gunungkidul sebesar 80 orang, Kabupaten Kulonprogo sebesar 72 orang dan Kabupaten Sleman sebesar 77 orang (Dinas Sosial Provinsi DIY, 2013). Pada tahun 2014 jumlah anak jalanan di Kabupaten Bantul yaitu sebesar 115 orang, Kota Yogyakarta sebesar 106 orang, Kabupaten Gunungkidul sebesar 71 orang, Kabupaten Kulonprogo sebesar 65 orang dan Kabupaten Sleman sebesar 70 orang (Dinas Sosial Provinsi DIY, 2014). Pada tahun 2015 Kabupaten Bantul yaitu sebesar 110 orang, Kota Yogyakarta sebesar 96 orang, Kabupaten Gunungkidul sebesar 60 orang, Kabupaten Kulonprogo sebesar 54 orang dan Kabupaten Sleman sebesar 59 orang (Dinas Sosial Provinsi DIY, 2015). Pada tahun 2016 Kabupaten Bantul yaitu sebesar 106 orang, Kota Yogyakarta sebesar 90 orang, Kabupaten Gunungkidul sebesar 55 orang, Kabupaten Kulonprogo sebesar 49 orang dan Kabupaten Sleman sebesar 54 orang (Dinas Sosial Provinsi DIY, 2016). Pada tahun 2017 Kabupaten Bantul yaitu sebesar 82 orang, Kota Yogyakarta sebesar 78 orang, Kabupaten Gunungkidul sebesar 64 orang,

Kabupaten Kulonprogo sebesar 43 orang dan Kabupaten Sleman sebesar 60 orang (Dinas Sosial Provinsi DIY, 2017). Pada tahun 2018 jumlah anak jalanan di Kabupaten Bantul lebih besar dibandingkan dengan kabupaten lain yang berada di Provinsi DI Yogyakarta, yaitu sebesar 114 orang, Kota Yogyakarta sebesar 80 orang, Kabupaten Gungkidul sebesar 72 orang, Kabupaten Kulonprogo sebesar 49 orang dan Kabupaten Sleman sebesar 60 orang (Dinas Sosial Provinsi DIY, 2018)

Bersadarkan data-data tersebut dan observasi didapatkan bahwa kinerja Dinas Sosial dalam program penanganan anak jalanan di Kabupaten Bantul belum berjalan dengan optimal dengan masih banyak ditemukannya/masih dijumpai di jalan-jalan, perempatan lampu merah, restoran, mall dan tempat-tempat umum lainnya, apalagi bulan ramadhan anak jalanan seketika meningkat pesat dan datang dari berbagai daerah. Jumlah anak jalanan didominasi oleh anak-anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sedangkan gelangdangan dan pengemis kebanyakan berada di pasar tradisional Aksi anak jalanan berkedok pakaian kusam, jadi pengamen dan ada juga yang membawa gelas air mineral untuk meminta-minta belas kasihan, berpakaian badut kepada pengendara motor dan mobil.Selain itu juga program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk mengatasi permasalahan anak jalanan adalah melakukan razia terhadap anak jalanan selama 2 kali dalam sebulan dengan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bantul yang dinamakan dengan Tim Reaksi Cepat (TRC). Apabila dalam razia didapatkan anak jalanan maka anak jalanan tersebut akan diserahkan kepada pemerintah Provinsi DIY dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi DIY untuk dilakukan pembinaan.

Anak jalanan adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Kriteria :

- a. Anak yang rentan bekerja di jalanan karena suatu sebab.
- b. Anak yang melakukan aktivitas di jalanan.
- c. Anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan.
- d. Jangka waktu di jalanan lebih dari 6 jam per hari dan dihitung untuk 1 bulan yang lalu (Dinas Sosial Provinsi DIY, 2018).

Anak Jalanan menjadi permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus dari pemerintah dan masyarakat, karena anak harus mendapatkan perlindungan baik pendidikan, kesehatan, keamanan, bebas dari kekerasan dan eksploitasi dan lainnya. Keberadaan anak jalanan dianggap masalah bagi masyarakat, sehingga pemerintah dituntut agar dapat menangani anak jalanan. Anak jalanan dikenal memiliki watak dan perilaku yang kasar, keras dan kerap dianggap mengganggu ketertiban umum, perilaku ini terbentuk karena berada pada lingkungan yang kasar dan keras.

Untuk mengatasi permasalahan anak jalanan, sudah merupakan tugas pemerintah tentang pembinaan dan kesejahteraan anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani, rohani maupun sosialnya. Dampak dari anak jalanan adalah mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas. Bagi anak jalanan dan komunitasnya rentan pada penyimpangan seksual (prostitusi) dan penyakit menular, tanpa identitas, perkawinan dini dan mengabaikan kelembagaan keluarga, pendidikan yang terputus, masa depan keluarga dan komunitas yang buruk (Bappeda Bantul, 2014).

Permasalahan ini muncul akibat dari berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan dan aturan hukum yang melandasi berbagai program tentang anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan dan ayat (4) anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Penanganan anak jalanan semestinya bertujuan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjamin atas hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan ataupun diskriminasi.

Selain itu juga perlunya pendekatan keamanan dan ketertiban serta menjangkau pencegahan dan pelarangan apa dan siapa yang menjadi penyebab dan menyuburkan anak jalanan dan mengembalikan mereka pada harkat dan martabat yang sejatinya sebagai seorang anak sesuai dengan Perda DIY No 11 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak di Jalan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Sosial berdasarkan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 berupaya melakukan berbagai program penanaman anak jalanan mulai dari pemenuhan berbagai hak yang seharusnya mereka dapatkan hingga pengambilan anak jalanan ke keluarga masing-masing. Program tersebut berupa :

- a. Penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, perlakuan salah terhadap anak, dan penelantaran pada kelompok rentan.
- b. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga Masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan Perlindungan anak.
- c. Melibatkan organisasi anak untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, perlakuan salah terhadap anak, dan penelantaran pada kelompok rentan.

Program menanggulangi anak jalanan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul adalah melalui Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Program-program yang disusun dalam dokumen perencanaan setiap lima tahun sekali mengalami perubahan nama program namun memiliki target yang sama, sehingga kajian dari penelitian ini akan memperdalam program yang diadakan pemerintah untuk menanggulangi anak jalanan di Kabupaten Bantul. Program tersebut sebagai penentuan tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga program adalah suatu jenis rencana yang disusun lebih konkrit, di dalamnya terkandung sekumpulan kegiatan yang berbeda-beda akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama.

Program yang tertulis dalam dokumen perencanaan setiap lima tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) akan dijabarkan didalam Dokumen tahunan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Didalam RKPD akan dijabarkan kegiatan apa saja yang dilakukan dinas tenaga kerja dan sosial dalam menanggulangi jumlah anak jalanan yang ada di Kabupaten Bantul. Sehingga dapat diketahui bagaimana program pemerintah dalam menanggulangi anak jalanan berjalan. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan program pemerintahan berjalan dengan baik.

Dalam rangka memberikan pelayanan kesejahteraan sosial khususnya terhadap anak jalanan maka diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, organisasi sosial, organisasi masyarakat, dan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) yang kegiatannya berkaitan erat dengan pengelolaan penyandang masalah kesejahteraan khususnya usaha-usaha kesejahteraan sosial. Sehingga dapat dikaji lebih mendalam bagaimana proses penyusunan program, hambatan yang terjadi dalam program tersebut dan upaya penanganannya oleh pemerintah. Penyusunan program penanganan anak jalanan erat kaitannya dengan anggaran yang diperlukan. Jumlah anggaran yang diusulkandalam proses penyusunan program tersebut digunakan sebagai pelaksana kegiatan dalam menangani anak jalanan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, menarik untuk diteliti agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan anak sesuai kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan di perkuat oleh Peraturan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018. berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kabupaten Bantul.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diambil rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana kinerja Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kabupaten Bantul?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dari kinerja Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan Di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan adalah :

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kabupaten Bantul
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa faktor pendukung dan penghambat dari kinerja Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan Di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Mahasiswa

- a. Mengembangkan pengetahuan mahasiswa dalam hal penyusunan program pemerintah dalam menanggulangi jumlah anak jalanan di Kabupaten Bantul.
 - b. Menambah wawasan mahasiswa dan mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapat selama bangku kuliah mengenai penanganan anak jalanan.
2. Bagi Instansi Terkait
- a. Membangun relasi dengan perguruan tinggi maupun dengan mahasiswa.
 - b. Dapat memanfaatkan Laporan Tugas Akhir sebagai salah satu sumber informasi terkait dengan tempat praktek tersebut sehingga dapat menjadi acuan untuk meminimalisir kendala.

E. Penelitian Terdahulu

Arifin Ilham (2017) dengan Pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2016. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Sosial dan Masyarakat masih menuai berbagai permasalahan seperti keterbatasan SDM, dana, sarana dan prasarana. Hal ini menyebabkan usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum menunjukkan hasil yang diharapkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung.

Huruswati (2015) dengan judul Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Desa

Tertinggal Melalui Rumah Sosial di kabupaten Muara Teweh Kalimantan Tengah. Hasil penelitian didapatkan bahwa keberadaan Rumah Sosial, dapat membawa program pemerintah kepada masyarakat secara langsung. Rumah Sosial mencerminkan tanggung jawab sosial yang tinggi dan kunci keberhasilannya adalah sinergi antara pengelola Rumah Sosial.

Yuli Witdayanti (2016) dengan judul Implementasi Perda Diy Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian didapatkan bahwa Implementasi Perda No.6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan di Kota Yogyakarta belum berhasil untuk mengentaskan anak dari kehidupan jalanan. Merubah *mindset* dan pola perilaku tidak mudah dan tentu saja memerlukan waktu yang panjang untuk melihat perubahan tersebut .

Ribut Mayasaroh Fakultas Tarabiyah dan keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015 dengan judul ‘Strategi Pembinaan Akhlak Anak Jalanan Di Sanggar Alang-Alang Surabaya’. Inti dalam penelitian ini adalah: Adanya Perilaku tercela yang tergolong ringan dan berat. Strategi yang digunakan dalam pembinaan akhlak anak jalanan adalah dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan seni music dengan menanamkan nilai-nilai etika (kesopanan), (keindahan) norma, dan agama. Faktor penghambat yakni kurang aktifnya anak dalam mengikuti kegiatan pembinaan, sedangkan faktor pendukungnya adalah tersedianya sarana dan prasarana, adanya dukungan

dari masyarakat dan pemerintah dan keberhasilan strategi pembinaan akhlak sanggar Alang-Alang adalah di saat anak jalanan mampu menjauhi perbuatan yang dilarang agama.

Ami prihandra Fakultas Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serang pada tahun 2012 dengan judul Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan DI kota serang Banten dalam penelitian tersebut penelitian mendeskripsikan Dinas social Kota serang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dib dang social. Salah satunya permasalahan anak jalanan.Oleh karena itu Dianas Sosial mlakukan pmbinaan terhadap anak jalanan sebagai upaya nyata untuk mnanggulangi anak jalanan yang yang Ada di Kota Serang.Fokus Penlitan Ini adalah Kinerja Dinas Sosial dalam penanganan anak jalnan di Kota Serang.Metode yang di ggunkakan adalah metode kantiatif deskriptif. Adanya sampel penlitian yang digunakan oleh penliti adalah 30 orang anak ajalan yang telah mendapatkan pembinaan dari dinas Sosial Kota Serang.

Nindhita Nur Manik Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2013 dengan judul pelaksanaan Pembinaan anak terlantar di balai Rehabilitas Sosial Wiloso Muda-Muda Purworejo dalam penelitian tersebut Penelitian skripsi ini membahas tentang diskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Subjek penelitian ini adlah anak di balai rehabilitas social ‘Wiloso Muda-Mudi’ Purworejo metode pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Anaisi data dilakaukan dengan display data reduksi data dan pengambilan kesimpulan .keabsahan data menggunakan triangulasi tekni/metode dan sumbe dat. Hasil penlitian menunjkn bahwa pelaksanaan embinaan anak terlantr meliputi penyampaian materi mnggunakan bahasa sederhana dan selingi engan contoh kehidupan sehari-hari

Jenis penelitian terdahulu merupakan acuan penelitian untuk dapat menjadi dasar untuk melakukan pengambilan keputusan penelitian. Berikut Berdasarkan hasil penelitian studi terdahulu dapat diklarifikasikan dalam tabel dibawah:

Tabel 1.3

Data Tabel Persamaan Dan Perbedaan Riset yang Di Teliti

No	Penelitian	Peneiti	Hasi
1.	Pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial (Studi kasus : Bandar Lampung Tahun 2016	Arifin Ilham (2017)	Dinas Sosial dan Masyarakat masih menuai berbagai permasalahan seperti keterbatasan SDM, dana, sarana dan prasarana. Hal ini menyebabkan usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum menunjukkan hasil yang diharapkan oleh pemerintah Kota

			Bandar Lampung.
2.	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Desa Tertinggal Melalui Rumah Sosial di kabupaten Muara Teweh Kalimantan Tengah Tahun 2014	Huruswati (2015)	penelitian didapatkan bahwa keberadaan Rumah Sosial, dapat membawa program pemerintah kepada masyarakat secara langsung. Rumah Sosial mencerminkan tanggung jawab sosial yang tinggi dan kunci keberhasilannya adalah sinergi antara pengelola Rumah Sosial.
3.	Implementasi Perda Diy Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Di Kota Yogyakarta.	Yuli Witdayanti (2016)	penelitian didapatkan bahwa Implementasi Perda No.6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan di Kota Yogyakarta belum berhasil untuk mengentaskan anak dari kehidupan jalanan. Merubah <i>mindset</i> dan pola perilaku tidak mudah dan tentu saja memerlukan waktu yang panjang untuk melihat perubahan tersebut.
4.	Strategi Pembinaan Akhlak Anak Jalanan Di Sanggar Alang-Alang Surabaya (studi kasus Adanya Perilaku tercela yang tergolong ringan dan berat.	Ribut Mayasroh (2015)	Strategi yang digunakan dalam pembinaan akhlak anak jalanan adalah dengan pendekatan ilmu ilmu pengetahuan dan seni music dengan menanamkan nilai nilai etika (kesopanan), (keindahan) norma, dan agama. Faktor penghambat yakni kurang aktifnya anak dalam mengikuti kegiatan pembinaan, sedangkan faktor pendukungnya adalah tersedianya saran dan prasaran, adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah

5.	Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan DI kota serang Banten (studi kasus penelitan tersebut penelitian mendeskrisikan Dinas sosial Kota serang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dib dang social.	Ami prihandra (2012)	Metode yang di ggunkakan adalah metode kantiatif deskriptif. Adanya sampel penlitian yang digunakan oleh penliti adalah 30 orang anak ajalan yang telah mendapatkan pembinaan dari dinas Sosial Kota Serang.
6.	pelaksanaan Pembinaan anak terlantar di balai Rehabilitas Sosial Wiloso Muda-Muda Purworejo dalam penelitian tersebut Penelitian skripsi ini membahas tentang diskriptif dengan pendekatan Kualitatif.	Nindhita Nur Manik (2013)	Hasil penlitian menunjukn bahwa pelaksanaan embinaan anak terlantar meliputi penyampaian materi mnggunakan bahasa sederhana dan selingi engan contoh kehidupan sehari-hari.

Sumber : Di olah oleh Penulis Skipsri

Perbedaan analisis pada penelitian sebelumnya terletak pada obyekatau lokasi penelitian yang di lakukan oleh peneliti dan variabel penelitian terdahulu sepet Jumlah SDM , Perda , Perilaku anak yang tidak sesuai dalam akhlak Agama penulisan juga menjadi perbedaan penelitian sebelumnya. Persamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada acuan-acuan teori yang menjadi penelitian yaitu terletak pada transparansi, penggunaan dana dan kinerja dinas. Sehingga mempermudah dan membantu dalam proses penelitian.

F. Kerang Dasar Teori

1. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Secara Umum Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Luthans (2008:165) kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan Torrington, Hall, dan Taylor (2009:115), kinerja adalah Suatu cara untuk mendapatkan hasil yang baik bagi organisasi, kelompok dan individu dengan memahami dan mengelola kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, standar dan persyaratan kompetensi yang telah ditentukan

Menurut Armstrong (2009:9), Manajemen Kinerja adalah proses sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan mengembangkan kinerja individu dan tim. Dengan demikian Kinerja manajemen merupakan proses komunikasi terus menerus yang

dilakukan antara supervisor dan karyawan sepanjang tahun. Menurut Dessler (2013:335), Kinerja manajemen adalah proses terus-menerus mengidentifikasi mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim serta menyelaraskan kinerja mereka dengan tujuan organisasi.

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 2013:41). Kinerja merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya sebuah tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati secara bersama-sama selama periode tertentu yang dibandingkan dengan berbagai kemungkinan (Rivai dan Basri, 2008:50).

Dari Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa (kinerja) adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Disamping itu, juga untuk menentukan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggapan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan dan penentuan imbalan. Tujuan dari penilaian kerja (kinerja) adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan **kinerja** organisasi dari SDM organisasi.

2. Definisi Kinerja Organisasi

Sebuah Organisasi dapat berjalan karena ada orang-orang yang

menjalankannya, karena itu manusia merupakan elemen utama yang dibutuhkan sebuah organisasi untuk dapat menjalankan visi misinya. Begitu juga sebaliknya orang-orang membutuhkan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan yang maksimal diperlukan orang-orang yang mampu bekerja dengan baik. Seorang pegawai dapat dikatakan baik apabila kinerjanya dapat sesuai dengan target dan tanggung jawab yang diembanya. Kinerja seseorang dapat di kembangkan setiap saat seiring dengan perkembangan zaman yang terus maju. Kualitas kinerja sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan organisasi, oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan keahlian tinggi sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi

Kinerja organisasi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap individu yang bekerja dalam organisasi. Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi, maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik. Dengan demikian kinerja organisasi merupakan cermin dari kinerja individu (mahmudi, 2005:22)

Nasucha, mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenan melalui usaha-usaha yang

sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhan secara efektif (pasolong,2010:177)

Selain itu menurut Amstrong dan Baron kinerja disebut juga sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna lebih luas bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan stratego organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi (wibowo,2008:7)

Sehubungan dengan itu, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Jika dikaitkan dengan performance sebagai kata benda (*noun*)dimana salah satu masukannya adalah hasil dari suatu pekerjaan (*thing done*, pengertian *performance* atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral atau etika. Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan, dipengaruhi oleh, keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu (sedarmayanti,2010:259).

a. indikator Kinerja

Indikator kinerja itu penting untuk mengukur kinerja, mustahil manajemen bisa mengukur kinerja jika tidak ada penetapan indikator. Indikator merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan perusahaan.

Robbins (2006:567), menyatakan bahwa kinerja akan dinilai dari :

- 1) Hasil tugas yang dapat diukur dari kuantitas dan kualitas yang dihasilkan oleh seorang karyawan, serta ketepatan waktu penyelesaiannya. Seorang karyawan yang dapat menghasilkan kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan standar, serta tepat waktunya menunjukkan tingkat kinerja tinggi.
- 2) Perilaku yang mengacu pada tindakan seseorang. Pola perilaku merupakan model tindakan yang digunakan seseorang dalam melakukan kegiatannya. Perilaku manusia sebenarnya bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Perilaku (*behavior*) mencakup dua (2) komponen penting yang saling berkaitan, yaitu sikap (mental) dan tingkah laku (*Attitude*). Dua (2) komponen tersebut merupakan satu kesatuan, lalu membentuk suatu perilaku tertentu. Mental dalam arti sikap diartikan sebagai reaksi terhadap suatu keadaan atau peristiwa tertentu dengan mendasarkan diri pada cita-cita pengetahuan dan percaya diri (*confidence*). Tingkah laku (*attitude*) adalah penampilan perbuatan tertentu dari manusia dengan cara-

cara tertentu pula (positif atau negatif) dalam menghadapi dan merespons/menanggapi suatu keadaan/kejadian/peristiwa tertentu, sesuai dengan situasi, kondisi ataupun lingkungan yang mempengaruhinya.

- 3) Sifat/karakteristik pribadi yang ditunjukkan oleh seseorang, misalnya dalam hal kesetiaan, ketaatan, kejujuran, dan sebagainya.

Kumorontomo (2011 : 23), kriteria yang dijadikan untuk pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik antara lain: (1) Efisiensi, yaitu menyangkut pertimbangan tentang organisasi pelayanan publik dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi 2) Efektifitas yaitu apakah tujuan yang didirikan organisasi pelayanan publik tersebut tercapai. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis Nilai, Misi, dan Tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan, 3) Keadilan yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan Publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau keadilan., 4) Daya tanggap yaitu organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari day tanggap Negara atau kebutuhan masyarakat yang mendesak. Karena itu organisasi secara keseluruhan harus dapat dipertanggung jawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria

daya tamggap ini.

b. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja

Wibowo (2011:100), Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah :

- a) *Personal factors*, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi dan komitmen individu.
- b) *Leadership factors*, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan *team leader*.
- c) *Team factors*, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan sekerja.
- d) *System factors*, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi.
- e) *Contextual/situational factors*, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Mangkuprawira (2009:155), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Intrinsik, yaitu personal individu, meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri,

motivasi, dan komitmen yang dimiliki setiap individu.

- 2) Faktor Ekstrinsik, yaitu kepemimpinan, sistem, tim, situasional, dan konflik, meliputi unsur :
 - a) faktor Kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan team leader dalam memberikan dorongan semangat, arahan dan dukungan kerja kepada karyawan
 - b) Faktor Tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim
 - c) Faktor Sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi
 - d) Faktor Situasional, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal
 - e) Faktor Konflik, meliputi konflik dalam diri, konflik antar individu dan konflik antar kelompok.

3. Anak Jalanan

1. Pengertian Anak Jalanan Menurut Departemen Sosial RI (2005: 5), Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan

mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

Selain itu, Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial (2001: 30) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja bermain atau beraktivitas lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat-tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain) oleh orang-orang di sekitar mereka, entah itu orang tua atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah. Ciri-ciri anak jalanan adalah anak yang berusia 6 – 18 tahun, berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak

terurus, dan mobilitasnya tinggi.

1. Karakteristik Anak Jalanan

a. Berdasarkan Usia

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial (2001: 30) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan untuk bekerja bermain atau beraktivitas lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Selain itu dijelaskan oleh Departemen Sosial RI (2001: 23–24), indikator anak jalanan menurut usianya adalah anak yang berusia berkisar antara 6 sampai 18 tahun.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak jalanan adalah yang memiliki usia berkisar antara 6 sampai 18 tahun.

b. Berdasarkan Pengelompokan

Pengelompokan Menurut Surbakti dkk. (1997: 59), berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam 3 kelompok yaitu: Pertama, *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi – sebagai pekerja anak- di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua

mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalankan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

Ketiga, *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala risikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah 17 pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah dapat ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan pinggiran sungai, walau secara kuantitatif jumlahnya

belum diketahui secara pasti.

c. Berdasarkan Ciri-ciri Fisik dan Psikis

Anak jalanan memiliki ciri-ciri khusus baik secara fisik dan psikis. Menurut Departemen Sosial RI (2001: 23–24), karakteristik anak jalanan pada ciri-ciri fisik dan psikis, yakni 1) Ciri Fisik: warna kulit kusam, rambut kemerah-merahan, kebanyakan berbadan kurus, pakaian tidak terurus, dan 2) Ciri Psikis meliputi mobilitas tinggi, acuh tak acuh, penuh curiga, sangat sensitif, berwatak keras, serta kreatif. Sedang menurut Departemen Sosial RI (2005: 5), anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

Dari beberapa sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik anak jalanan berdasarkan ciri-ciri fisik dan psikis mereka adalah:

1) Ciri-ciri fisik

- a) Penampilan kusam
- b) Badan dipenuhi tatto
- c) Rata-rata berbadan kurus

d) Pakaian tidak pernah dicuci

2) Ciri-ciri psikis

a) Mobilitas tinggi

b) Apatis

c) Sebagian besar berprasangka buruk

d) Berwatak keras

e) Mudah tersinggung

f) Kreatif

4. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk menolong orang-orang yang berada di bawah tekanan sosial tertentu untuk meraih kembali keseimbangan, kepercayaan dirinya dengan menghilangkan sebab- sebabnya atau kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem tindakan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi institusi- institusi sosial agar bisa diakses oleh anggota masyarakat (Suud, 2008:1).

Ada beberapa definisi tentang kesejahteraan sosial menurut pendapat para pakar sosiologi yang populer antara lain:

a. Suharto (2009:104), kesejahteraan sosial adalah sebagai “a condition

orstate of human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapat dapat dipenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

- b. Rukminto (2010:45), kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesulitan, dan ketentraman lahir dan bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan serangkaian aktifitas atau kegiatan perubahan kehidupan masyarakat ke arah positif tetapi yang terorganisir yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial (hubungan), serta peningkatan kehidupan masyarakat yang selaras dengan standar norma-norma masyarakat yang ada di lingkungan sekeliling mereka, pembangunan tersebut bukan hanya fokus pada satu dimensi (ukuran) kesejahteraan ekonomi saja, tetapi mengutamakan dimensi kemanusiaan, serta sosial budaya, masyarakat

dan lingkungan alam.

Pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pada Undang-undang Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 juga menyebutkan bahwa:

- a. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.
- b. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah.
- c. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang di didik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

- d. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial.
- e. Relawan sosial adalah seseorang dan atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial.
- f. Pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- g. Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat.
- h. Rehabilitas sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- i. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
- j. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya.
- k. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kesejahteraan sosial merupakan segala sesuatu hal atau usaha untuk mencapai suatu perubahan kehidupan kearah yang lebih baik bagi individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat yang mengalami penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan. Atau pencapaian kehidupan masyarakat melalui pemenuhan pendidikan, kesehatan, politik, agama, ekonomi, budaya, hukum, penyediaan lapangan kerja dan penyediaan tempat usaha serta penyediaan fasilitas-fasilitas umum

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual menjelaskan tentang pembatasan konsep dengan konsep yang lain untuk menghindari terjadi kesalahpahaman. Berdasarkan kerangka teori yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diuraikan beberapa konsep penelitian sebagai berikut:

1. Kinerja adalah suatu hasil dari tindakan seorang pekerja sesuai dengan pekerjaannya dan diawasi oleh orang-orang tertentu yaitu seorang atasan atau pimpinan dan dukungan dari organisasi.
2. Kinerja organisasi adalah kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada organisasi dengan sebaik-baiknya guna mencapai sasaran yang telah disepakati.
3. Anak Jalanan adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat-tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran.

H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan penelitian ini maka diperlukan operasionalisasi dari variabel penelitian tentang Kinerja Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan Di Kabupaten Bantul, adapun menurut Kumorotomo dan Wibowo (2011 : 100), dan faktor-faktor Kinerja

1. Kinerja Dinas Sosial Bantul

Tabel 1.4

Definisi

Variabel	Indikator	Tolak Ukur
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kabupaten Bantul	<i>Efisiensi</i>	<ul style="list-style-type: none">- Memaksimalkan sumber daya manusia- Memaksimalkan Sumber daya Finansial
	<i>Efektivitas</i>	<ul style="list-style-type: none">- Sesuai dengan tujuan- Tepat sasaran
	<i>Keadilan</i>	<ul style="list-style-type: none">- Ketercukupan dalam penanganan anak jalanan di Bantul- Kepantasan penanganan anak jalanan di Bantul
	<i>Daya tanggap</i>	<ul style="list-style-type: none">- Responsifitas dari dinas sosial dan penanganan anak jalanan di Bantul

--	--	--

2. Faktor yang mempengaruhi Kinerja

Tabel 1.5
Faktor Kinerja

Variabel	Indikator	Tolak Ukur
1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan Di Kabupaten Bantul	<i>personal factors</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan - Kompetensi - Motivasi - Komitmen
	<i>leadership factor</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kualias dorongan - Dukungan - Bimbingan - Team leader
	<i>team factors</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Dukungan
	<i>System Factory</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem kerja - Fasilitas
	<i>Contextualiation Factory</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan lingkungan internal - Eksternal

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013: 1) penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan yang alamiah. Peneliti merupakan instrumen kunci yang mengumpulkan data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil dari penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi.

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif melalui metode kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti terkait apa kinerja Dinas Sosial Dalam Program Penanganan Anak Jalanan Di Kabupaten Bantul. Peneliti menggunakan tipe penelitian ini karena penelitian kualitatif biasa digunakan untuk meneliti suatu perilaku dan tindakan suatu organisasi dalam upaya mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai kinerja Dinas Sosial Dalam Program Penanganan Anak Jalanan Di Kabupaten Bantul yang menjadi fokus perhatian peneliti.

Peneliti menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku orang yang diamati, yang kemudian data tersebut yang diperoleh di lapangan dikumpulkan dalam bentuk data-data seperti kata/prilaku dan kalimat, dengan latar belakang alamiah yang mana manusia merupakan instrumen.

Kemudian data-data tersebut digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena sosial yang diteliti.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer merupakan data lapangan yang diperoleh langsung dari orang-orang atau pelaku yang menjadi subjek dalam penelitian ini seperti melalui hasil wawancara yang dibuat yaitu tentang kinerja Dinas Sosial Dalam Program Penanganan Anak Jalanan Di Kabupaten Bantul.

Tabel 1.6
Data Primer Penelitian

Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
------------	-------------	-------------------------

Data Primer	1. Kab.Keuangan Rosnita Irawati, SE Dinas Sosial Bantul	- Wawancara
	2. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Anastasia Diah Setiawan , SH,MH	- Wawancara
	3. Sub.Bagian program Linakung Herawati SIP	- Wawancara

Sumber : Dinas sosial Kabupaten Bantul

b. Data sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer yang berupa formulir, bukti, catatan maupun dokumen-dokumen perusahaan lainnya. Dalam hal ini data-data yang berkaitan tentang kinerja Dinas Sosial Dalam Program Penanganan Anak Jalanan Di Kabupaten Bantul.

Tabel 1.7

Data Sekunder Penelitian

Nama Data	Sumber Data
Renstra Dinas sosial P3A 2016-2021	Dinas Sosial Kab. Bantul DIY

Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2017-2018	Dinas Sosial Kab. Bantul DIY
--	------------------------------

Sumber : Dinas sosial Kabupaten Bantul

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013:231). Teknik wawancara ini dilakukan secara formal dan intensif sehingga akan mampu memperoleh informasi sebanyak mungkin secara jujur dan detail. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial Dalam Program Penanganan Anak Jalanan Di Kabupaten Bantul. Informan dalam penelitian ini adalah bagian yang menangani anak jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan wawancara mendalam yaitu berupa percakapan dengan informan terhadap obyek yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab antara penulis dan informan dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*)

maupun wawancara terbuka (*open interview*) yang membuka kesempatan kepada informan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya tentang fenomena penelitian.

b. Dokumentasi

Informasi lainnya didapatkan melalui dokumentasi. Dokumen digunakan karena dalam banyak hal dokumen sangat membantu sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan. Beberapa bahan bacaan, baik berupa makalah, jurnal/majalah, *company profile* dan dan lain-lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian juga dijadikan peneliti sebagai bahan informasi tambahan.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan peninjauan secara langsung di lapangan. Dalam observasi studi yang secara langsung dan sistematis untuk mengamati fenomena sosial dan gejala-gejala psikis yang ada dalam rangka analisis. Peneliti melakukan kunjungan langsung dan mengumpulkan data serta informasi mengenai kinerja Dinas Sosial dalam Program Penanganan Anak Jalanan Di Kabupaten Bantul. Pengamatan dilaksanakan dengan menelusuri hasil wawancara kepada *key informan* dan dicatat dengan alat tulis. Peneliti melakukan observasi secara langsung di lapangan, yaitu dengan melihat secara keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Menurut Parsudi Suparlan dalam Patilima (2007: 60-61) menyebutkan ada delapan hal penting yang harus diperhatikan oleh peneliti yang menggunakan metode pengamatan, yakni:

1. Ruang atau tempat, setiap kegiatan, meletakkan sesuatu benda, dan orang dan hewan tinggal, pasti membutuhkan ruang dan tempat. Tugas dari si peneliti adalah mengamati ruang atau tempat tersebut untuk dicatat atau digambar.
2. Pelaku, peneliti mengamati ciri-ciri pelaku yang ada di ruang atau tempat. Ciri-ciri tersebut dibutuhkan untuk mengkategorikan pelaku yang melakukan interaksi.
3. Kegiatan, pengamatan dilakukan pelaku-pelaku yang melakukan kegiatan-kegiatan di ruang, sehingga menciptakan interaksi antara pelaku yang satu dengan pelaku lainnya dalam ruang atau tempat.
4. Benda-benda atau alat-alat, peneliti mencatat semua benda atau alat-alat yang digunakan oleh pelaku untuk berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan pelaku.
5. Waktu, peneliti mencatat setiap tahapan-tahapan waktu dari sebuah kegiatan. Bila memungkinkan, dibuatkan kronologi dari sebuah kegiatan untuk mempermudah melakukan pengamatan selanjutnya, selain juga mempermudah menganalisis data berdasarkan deret waktu.

6. Peristiwa, peneliti mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi selama kegiatan pelaku. Meskipun peristiwa tersebut tidak menjadi perhatian atau peristiwa biasa saja, namun peristiwa tersebut sangat penting dalam penelitian.
7. Tujuan, peneliti mencatat tujuan dari setiap kegiatan yang ada. Kalau perlu mencatat tujuan dari setiap bagian kegiatan.
8. Perasaan, peneliti perlu juga mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap peserta atau pelaku kegiatan, baik dalam bahasa verbal maupun non verbal yang berkaitan dengan perasaan atau emosi.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dari berbagai sumber informasi dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan kinerja Dinas Sosial dalam Program Penanganan Anak Jalanan Di Kabupaten Bantul.

4. Analisis Data

Proses pengumpulan data dibagi dalam tiga tahapan (Moleong, 2007: 117) yaitu:

- e. Tahap pertama diawali dengan mereduksi data, yaitu melakukan koding berkaitan dengan informasi-informasi penting yang terkait dengan masalah

penelitian, berikut pengelompokan data sesuai dengan masing-masing topik permasalahan.

f. Tahap kedua, data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi sehingga berbentuk informasi bermakna sesuai dengan permasalahan penelitian

g. Tahap ke tiga, pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap kedua sehingga dapat memberi jawaban atas permasalahan penelitian.

